

Ekilas EKONOMI

Fiskal untuk UMKM

ngusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak sentif fiskal kepada pengusaha sektor usaha l). Ketua Hipmi, Erwin Aksa mengatakan, ang (UU), batasan Pajak Pertambahan Nilai il itu Rp 2,5 miliar. Oleh karena itu, pihaknya an tersebut agar memperoleh pembebasan k penghasilan (PPh). "Pengusaha UKM itu agar dapat pembebasan PPN dan penurunan ap Erwin di Jakarta, Sabtu (9/10). Meskipun n, beberapa usulan Hipmi telah ditanggapi usnya Kementerian Keuangan. Seperti us- in daya dukung sektor UKM, serta yang ter- fikal yang tercantum dalam Keputusan 1/2003 tentang Perubahan atas Keputusan 552/KM/K.04/2000 tentang Batasan Pe- nahan Nilai (PPN). Dia juga berharap agar membuat kebijakan yang tepat untuk men- kami lakukan ini agar kesadaran para pelaku ngat rendah karena mereka kurang disiplin, perusahaan maupun perusahaan kecil yang ama sekali," tuturnya. (Net)***

Bidik Pangsa Pelajar

populasinya tidak sampai separuh jumlah pasar potensial bagi operator CDMA. Menu- gion Il Jabar PT Bakrie Telecom Tbk., Yukie a melakukan isi ulang Rp 5.000-Rp 10.000, lan. "Mereka memang belum memiliki daya omunikasi ada. Untuk memenuhi kebutuhan h, mereka memilih CDMA," tuturnya di sela- mpelas Walk (Ciwalk), Jin, Cihampelas, Ban- ain, kata dia, segmen pelanggan ini terhitung elajar bagi penjurian Esia. Namun, menurut lah di bawah segmen mahasiswa dan pro- ta di peringkat kedua atau ketiga," tuturnya. ager A'ra Bandung Timur, Yefrizal. Menurut isia secara nasional mencapai 13,5 juta dan i wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung.

Korupsi dan Pembangunan Ekonomi



kali dihubungkan dengan kemampuan berinvestasi dan kemampuan perekonomian dalam menyedikan lapangan kerja. Celakanya, uang yang diperoleh sebagai hasil korupsi cenderung dibelanjakan pada jenis barang (dan jasa) yang bersifat konsumtif.

Bila tindakan korupsi masih dilakukan secara luas, yang terjadi adalah re- latif lebih tingginya pertumbuhan industri barang-barang mewah yang sebenarnya tidak terlalu dibu- tuhkan negara berkembang seperti In- donesia. Industri-industri ini biasanya relatif padat kapital sehingga pertum- buhan industri ini tidak sesuai dengan daya serap tenaga kerja untuk

memerangi tingkat pe- ngangguran yang sangat dibutuhkan. Lebih jauh la- gi, industri penghasil barang mewah tersebut biasanya melibatkan pelaku yang berasal dari golongan pendapatan tinggi. Sudah dipastikan tidak akan terjadi efek menetes kebawah (*trick- ling down effect*) kepada industri kecil dan menen- gah (UKM) yang mem- pekerjakan begitu banyak tenaga kerja.

Pada akhirnya, corak pertumbuhan in- dustri seperti ini akan membawa pada distribusi pendapatan yang semakin tidak merata.

Untuk menangkal hal tersebut, mari kita biasakan bahwa tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara

bukanlah "barang mewah", melainkan kebutuhan yang bisa kita penuhi. Hal ini dapat terwujud melalui arah pem- bangunan yang bertumpu pada kualitas manusia seperti yang tecermin dalam IPM yang harus terus ditingkatkan dan dipertahankan. Masyarakat terdidik tentu akan menjadi pelaku dan penga- wal reformasi birokrasi yang dibutuh- kan sebagai pendamping pembangun- an ekonomi. Kedua, kita tempatkan target pertumbuhan ekonomi secara proporsional sehingga bukan hanya as- pek kuantitas yang diperoleh, melain- kan juga kualitasnya. Kualitasdimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang bercorak pada pertumbuhan industri yang berpihak pada penciptaan lapang- an kerja dan perbaikan distribusi pen- dapatan. (Horas Djulius, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pasun- dan)***

Jamsostek Perbanyak Rumah Susun Sewa

JAKARTA, (PR)-

PT Jamsostek (Persero) akan terus membangun rumah susun sewa (rusunawa) untuk pekerja di sekitar kawasan industri. Hal ini merupakan upaya mening- katkan manfaat kepesertaan.

"Banyak permintaan daerah untuk membangun rusunawa, seperti Surabaya, Makassar, dan Bandung. Namun, lokasinya harus strategis dan yang paling

mulai akhir 2010.

Disebutkan, anggaran rusu- nawa bersumber dari dana pe- ningkatan kesejahteraan peserta (DPKP) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate so- cial responsibility/CSR*). Setiap tahunnya, Jamsostek menyisih- kan 5-10 persen dari laba bersih. Rusunawa Batam dengan se- puluh menara kembar meng- habiskan anggaran sekitar Rp

